

KEBIJAKAN PERTAHANAN AUSTRALIA DAN RESPONS NEGARA-NEGARA ASIA TIMUR DAN SELANDIA BARU#

Athiqah Nur Alami*

Abstract

Australia's position in Asia Pacific has a significant consideration on their policy making, primarily defense policy. Their close relationship with The United States of America and the United Kingdom sometimes becomes impediment in building relations with neighbor countries in Asia. The Australia's defense policy more or less reflects the big countries' interest in Asia Pacific, including Proliferation Security Initiatives, SM-3 and AMIZ policies. Those policies bring about various reactions from the East Asian Countries and New Zealand. The different reactions are related strongly with their interest and cooperation with Australia.

Australia merupakan suatu negara sekaligus benua yang memiliki karakteristik cukup menarik dibanding negara lain. Kebijakan Australia yang lebih condong ke Barat ternyata kerap menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Pasifik. Pasalnya kebijakan pemerintahan Australia sedikit banyak tidak jauh berbeda bahkan sejalan dengan Inggris dan Amerika Serikat. Termasuk di dalamnya kebijakan pertahanan Australia yang cenderung selalu memerlukan payung pertahanan dari negara besar, dalam hal ini terjadi pergeseran dari Inggris ke Amerika, yang dikenal dengan pergeseran dari *Pax Britanica* ke *Pax Americana* pada Desember 1941.

Di dalam laporan penelitian tahun ini, tim peneliti Australia berupaya menjelaskan bagaimana kebijakan pertahanan Australia tahun 2000-2005 termasuk perkembangan atau evolusi yang terjadi mulai pada tahun 1986 hingga 2005 dan isu-isu strategis yang muncul dalam kebijakan tersebut. Kebijakan pertahanan Australia ini tentu saja akan memberikan implikasi ataupun pengaruh terhadap negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, menganalisis respons dari negara-negara tetangga Australia dan juga negara-negara besar di Asia—meskipun tidak berbatasan langsung dengan Australia—terhadap kebijakan pertahanan Australia tersebut menjadi penting untuk dilakukan dalam penelitian ini. Negara-negara di kawasan Asia Timur yang kami pilih berdasarkan signifikansi negara-negara tersebut dengan Australia dan juga terhadap politik internasional di wilayah Asia Pasifik, yaitu Cina dan Jepang. Sementara negara di Asia Tenggara yang juga dianalisis, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan

* Penelitian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari Tri Nuke Pudjiastuti (koordinator), Ikrar Nusa Bhakti, Japanton Sitohang, Mohamad Rum, Athiqah Nur Alami, Adriana Elisabeth, Kusnanto Anggoro.

* Penulis adalah peneliti pada Bidang Politik Internasional P2P LIPI.

Thailand. Selandia Baru sebagai negara tetangga di selatan Australia juga menjadi bagian analisis atas respons terhadap kebijakan pertahanan Australia tersebut.

Pengaruh Lingkungan Strategis dalam Kebijakan Pertahanan Australia

Sebagai negara "kulit putih" yang berada di wilayah Asia, membuat Australia merasa perlu mengembangkan kebijakan pertahanan salah satunya dengan membangun jaring-jaring pertahanan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, menjaga kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu bentuk wujud aliansi abadi Australia kepada Amerika Serikat.

Dua penekanan dalam kebijakan pertahanan itulah yang terkadang menimbulkan dilema dalam kebijakan pemerintah Australia. Di satu sisi, Australia membutuhkan Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan negaranya. Tetapi di sisi lain keberadaan Australia sebagai kaki tangan Amerika Serikat dianggap menghambat Australia dalam membina hubungan dengan negara-negara Asia.

Oleh karena itu, Australia berupaya merumuskan kebijakan pertahanan yang telah mengalami evolusi sejak 1986 hingga saat ini, untuk mencari format yang paling tepat dalam menjaga hubungan dengan Amerika Serikat sekaligus membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangganya.

Jauh sebelum Australia merdeka pada tahun 1901 hingga tahun 1941, ketergantungan Australia kepada Inggris sangatlah besar karena sebagai salah satu negara Persemakmuran Inggris, Australia merasa masih memiliki keterikatan historis dan politis dengan Inggris. Namun perang dunia kedua membuat Inggris harus lebih memperhatikan kelangsungan eksistensinya di Eropa ketimbang menjaga keamanan negara-negara jajahannya di Asia Tenggara. Terlebih dengan jatuhnya Singapura —

sebagai salah satu negara Persemakmuran Inggris—ke tangan Jepang, menyebabkan Australia memikirkan kembali ketergantungannya dengan Inggris. Karena itulah, demi keamanan negara, Australia beralih ke Amerika Serikat yang diyakini dapat memberikan jaminan keamanan dan payung perlindungan pertahanan kepadanya.

Konsekuensi dari bentuk pengabdian-nya kepada Amerika Serikat, Australia diwajibkan untuk mendukung bahkan berjuang bersama dalam berbagai kebijakan Amerika Serikat. Misalnya, pasca-tumbangannya Uni Soviet, Amerika Serikat sedang giat memerangi komunisme di Asia Pasifik maka Australia pun melakukan hal serupa. Dengan mengedepankan *Forward Defence Strategy*, Australia bersama Amerika Serikat berupaya membendung penyebaran komunisme dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Selain itu tergabung dalam *South East Asia Treaty Organization (SEATO)*, *British Commonwealth Far East Strategic Reserve (FESR)* dan ANZUS bersama Amerika Serikat, menjadi pilihan Australia saat itu.

Ketergantungan Australia terhadap Amerika Serikat dan juga Inggris, tampaknya tidak cukup dapat bertahan lama, paling tidak untuk sementara waktu pada akhir tahun 1960-an, karena adanya perubahan lingkungan strategis di Asia saat itu. Akibatnya Australia mengalihkan kebijakan pertahanannya menjadi *Self-Defence Strategy*. Perubahan inilah yang kemudian membuat Australia perlu untuk merumuskan format kebijakan pertahanan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dan karakter bangsa Australia.

Untuk itu, pada tahun 1986 Menteri Pertahanan Australia saat itu, Kim Beazley menugaskan Paul Dibb, seorang mantan personel Departemen Pertahanan Australia untuk mengevaluasi pelaksanaan *Forward Defence Strategy* dan memberikan masukan tentang kemampuan apa yang tepat bagi instrumen pertahanan Australia. Hasilnya,

Dibb's Report¹ mengusulkan suatu strategi penangkalan bagi pertahanan Australia yang terdiri dari empat lapis². Lapis pertama meliputi *intelligence* dan *surveillance* yang komprehensif, dengan memberikan prioritas pada pengawasan sejauh 1000—1500 mil ke luar wilayah Australia. Strategi ini dimaksudkan untuk mendeteksi para penyusup di wilayah laut dan udara. Lapis kedua menekankan pada kemampuan kekuatan laut dan udara dalam melakukan penyerangan untuk mengatasi ancaman yang melintas di wilayah laut dan udara Australia. Lapis yang ketiga, memfokuskan pada kemampuan defensif untuk mencegah musuh mendekat ke wilayah penting di antaranya di jalur pelayaran Australia. Lapis terakhir mengandalkan *mobile ground forces* guna menumpas ancaman yang berhasil melewati laut dan udara yang dianggap membahayakan aset-aset penting dan pemukiman penduduk.

Masukan dari Paul Dibb ini ternyata menuai berbagai kritik, di antaranya kebijakan ini cenderung terlalu defensif dan isolasionis, selain pembebanan anggaran yang tidak sedikit jika memang strategi ini diterapkan Australia. Namun terlepas dari itu semua, tidak dapat dipungkiri bahwa masukan Dibb ini menjadi dasar dalam *review* kekuatan pertahanan Australia bahkan hingga Buku Putih Pertahanan Australia tahun 2000.

Setahun kemudian, dikeluarkanlah Buku Putih Pertahanan Australia "The Defence of Australia". Buku putih tahun 1987 yang merupakan kali pertama terwujudnya secara jelas artikulasi strategi militer Australia ini, menekankan pada pengembangan ikatan-ikatan keamanan yang

lebih dekat dengan kawasan sekaligus menegaskan kembali pentingnya aliansi-aliansi militer. Strategi penangkalan yang diusulkan Paul Dibb, sedikit banyak diadopsi dalam buku putih tersebut, terlihat dengan tetap adanya empat lapis strategi penangkalan. Namun perbedaannya, strategi tersebut lebih bersifat ofensif.

Setelah berakhirnya perang dingin dan juga terjadi berbagai persoalan politik domestik di beberapa negara di Asia Pasifik³, Australia mulai memperbaharui lagi strategi pertahanan dan keamanan sebagai respons dari perubahan lingkungan strategis saat itu. Akhirnya pada tahun 1994, Australia mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Australia "Defending Australia"⁴ yang memberikan perhatian lebih pada kerja sama pertahanan dengan negara-negara tetangga dan kurang menekankan pada ikatan pertahanan Australia dan Amerika Serikat⁵ dan mengubah strategi pertahanan menjadi "mencari keamanan di dalam Asia". Dengan ini berarti Australia telah mengubah cara pandang tentang bahaya kuning (Jepang) dan bahaya merah (RRC dan komunisme), dengan menjadikan mereka mitra demi keamanan dan kemakmuran bersama di Asia dan meletakkan hubungan mereka dalam empat pilar utama, yaitu politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan⁶.

¹ Alex Tewes, *Australia's Maritime Strategy in the 21st Century*, Research Brief No.4 2004-05, Foreign Affairs, Defence and Trade Sections, Canberra: Parliament of Australia, Parliamentary Library, dalam <http://www.aph.gov.au/library/pubs/RB/2004-05/05rb04.htm>. hal. 10—12.

² *Review of Australia's Defence Capabilities*, Report to the Minister for Defence by Mr. Paul Dibb, Maret 1986, Canberra: Australian Government Publishing Service.

³ Misalnya dalam konflik intern berbagai faksi di Kamboja, gerakan etnonasionalisme suku Karen di Myanmar, persoalan Moro di Filipina, persoalan Bougainville di Papua New Guinea, persoalan etnis India di Fiji, persoalan Aborigin di Australia, Gerakan Kemerdekaan Kanak di Kaledonia Baru, persoalan GAM, OPM dan integrasi Timor Timur di Indonesia.

⁴ Commonwealth of Australia, *Australia's Defence White Paper 1994: Defending Australia*, ACT: AGPS, 1994.

⁵ Pengenduran ikatan pertahanan dengan Amerika Serikat merupakan bentuk dari independensi politik luar negeri Australia di bawah pemerintahan Partai Buruh.

⁶ Makalah resmi yang dibawakan oleh PM Australia Bob Hawke, *Australia's Security in Asia*, The Asia Lecture organized by the Asia-Australia Institute, University of New South Wales, Sydney, 24 Maret 1991, dalam Ikrar Nusa Bhakti dkk, *Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Republik Indonesia-Australia, Kaitannya dengan Stabilitas dan Keamanan Regional Asia Tenggara: Suatu Tinjauan Strategis Politik*, Kerja sama PPW-LIPI dengan Balitbang Deplu RI, 1997, hlm. 97.

Pergantian tampuk kepemimpinan di Australia dari Partai Buruh kepada Partai Liberal-Nasional di bawah John Howard, tentu saja mempengaruhi konsep pertahanan keamanan sebelumnya. Dengan mengeluarkan "Australia's Strategic Policy"⁷ pada tahun 1997, menunjukkan bahwa PM John Howard lebih cenderung mendekati pada Inggris dan Amerika Serikat ketimbang dengan negara-negara tetangganya. Strategi ini menekankan pada strategi kontinental dengan orientasi utama pada kekuatan matra laut, yang ditunjang dengan kekuatan matra udara.

Perubahan lingkungan di sekitar Australia kembali terjadi pada akhir tahun 1990-an, di antaranya referendum dan akhirnya lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Peristiwa ini sempat menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Australia karena Australia dianggap mendukung kemerdekaan Timor Timur melalui operasi tentara Australia di sana. Dari operasi di Timor Timur menunjukkan bahwa Australia membutuhkan kekuatan angkatan laut yang lebih andal, bukan hanya untuk mengangkut pasukan tapi juga untuk melakukan penyerangan. Selain itu juga dibutuhkan angkatan udara yang tangguh guna menghalau musuh yang masuk ke negara-negara tetangga Australia dan mengusir musuh jauh dari wilayah Australia. Hal tersebut dituangkan dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2000 "Our Future Defence Force"⁸.

Tragedi serangan terhadap menara kembar WTC di Washington pada 11 September 2001 oleh sekelompok teroris yang hingga kini belum terungkap, kembali membuat Australia memperbarui strategi pertahanannya. Sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat, Australia kembali berjuang bersama Amerika Serikat dalam memerangi

terorisme yang dikenal dengan *Global Coalition Against Terrorism*. Ini termaktub dalam "Defence White Paper 2003: A Defence Update"⁹, yang berhasil mengidentifikasi tiga area ketidakpastian dan risiko, yaitu terorisme global, senjata pemusnah massal, dan kawasan bermasalah. Perubahan strategi pertahanan ini sesungguhnya amat terkait dengan perubahan strategi maritim Amerika Serikat dalam memerangi terorisme, di antaranya dengan kebijakan *Proliferation Security Initiatives* (PSI) yang dicetuskan George W. Bush pada 31 Mei 2003.

Berdasarkan berbagai buku putih yang dikeluarkan Australia, menunjukkan bahwa Australia belum sepenuhnya dan tampaknya tidak akan pernah "bertarung" secara mandiri. Koalisi dengan Amerika Serikat justru semakin erat dan tercermin dalam kebijakan pertahanan Australia berikutnya. Salah satu bentuk konkret koalisi Amerika Serikat dan Australia ditambah dengan berbagai negara lain dunia dalam rangka menggalang koalisi melawan terorisme, terlihat dalam berbagai latihan operasi militer dalam program PSI yang sering melakukan latihan bersama. PSI ditujukan untuk mencegah terjadinya perdagangan atau transfer ilegal senjata pemusnah massal antarnegara atau dari suatu negara ke aktor-aktor nonnegara yang melanggar aturan dan norma internasional¹⁰.

Sampai dengan tahun 2005, PSI telah didukung oleh lebih dari 60 negara dunia dari berbagai kawasan. Meskipun PSI bukanlah sebuah organisasi dan tidak memiliki sekretariat atau markas besar, kerja sama informal ini telah terbukti mampu mencegah pengembangbiakan senjata pemusnah massal.

⁹ Commonwealth of Australia, *Australia's National Security: A Defence Update*, Canberra, ACT: Department of Defence, 2003.

¹⁰ Commonwealth of Australia, *Weapons of Mass Destruction: Australia's Role in Fighting Proliferation, Practical Responses to New Challenges*, Canberra, ACT: Australian Government, 2005.

⁷ Commonwealth of Australia, *Australia's Strategic Policy*, Canberra, ACT: Department of Defence, 1997.

⁸ Commonwealth of Australia, *Defence White Paper 2000, Defence 2000: Our Future Defence Force*, Canberra, ACT: Department of Defence, 2001.

Bentuk kerja sama lain dalam rangka aliansi Amerika Serikat-Australia adalah penandatanganan nota kesepahaman dalam hal pertahanan missil pada Juli 2004, di antaranya diwujudkan melalui kerja sama pengembangan Standard Missile 3 (SM-3) yang merupakan pengembangan dari SM-1 dan SM-2. Kekuatan senjata yang ditujukan untuk memerangi terorisme inilah yang mendapatkan pertentangan dan respons beragam dari negara-negara tetangga Australia, khususnya negara-negara Asia Tenggara, dengan adanya indikasi akan munculnya pertarungan "The Son of Starwars".

Selain itu untuk mendukung pengamanan maritim, pada 15 Desember 2004 PM Australia John Howard mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan negara tetangga dengan akan menerapkan pengawasan sejauh 1000 nm (1850 km) terhadap kapal yang akan menuju Australia melalui kebijakan *Australia's Maritime Identification Zone (AMIZ)*¹¹. Kebijakan ini kembali mengundang respons beragam dari negara tetangga yang terkena imbas dari kebijakan ini, khususnya Indonesia. Sejauh 1850 km tersebut, untuk wilayah Indonesia berarti telah menjangkau sebagian besar wilayah Jawa dan melampaui laut Arafuru. Akibat reaksi dari berbagai negara maka kebijakan ini berganti menjadi *Australia's Maritime Identification System (AMIS)*. Perlu kita cermati, sesungguhnya perubahan kata "zone" menjadi "system" memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Bahkan penggunaan kata "system" membuat Australia lebih bebas menterjemahkan konsep kebijakan tersebut seluas-luasnya, yang berarti bukan tidak mungkin lebih dari sekadar "zone" yang dikritik oleh berbagai negara karena melanggar kedaulatan negara yang bersangkutan.

Isu Strategis dalam Kebijakan Pertahanan Australia

Selain membangun pertahanan missil bersama Amerika Serikat dalam PSI yang secara langsung maupun tidak langsung berwujud SM-3 atau AMIZ/S, strategi pertahanan Australia juga menekankan pada persoalan migrasi internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa Australia adalah sebuah negara yang dibangun oleh para migran yang datang dari berbagai belahan dunia, mulai dari benua Eropa, Asia, dan Amerika. Akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, ekonomi antarwarga inilah, yang kerap memunculkan persoalan dalam membangun identitas negara Australia. Selain itu, kehadiran para imigran yang tiap tahun kian bertambah, jelas menimbulkan tambahan persoalan bagi Australia. Pasalnya kehadiran mereka dianggap menjadi penyebab munculkan ketidakamanan di bumi Australia akibat aksi-aksi radikal mereka. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa sebagian besar mereka merupakan imigran ilegal.

Sebagai akibat semakin banyaknya migran ilegal yang masuk ke Australia maka pada September 2001 Parlemen Federal Australia meloloskan *Migration Amandement (Excision from Migration Zone) Act 2001*¹² yang ditujukan untuk mengurangi insentif bagi para migran yang masuk secara ilegal. Untuk menangani persoalan migran ini, Australia juga menerjunkan *Australian Defence Forces (ADF)* dengan menggelar operasi militer "Relex" yang melibatkan 5 buah kapal perang dan 4 pesawat pengintai dari sebelah barat pulau Christmas hingga Ashmore Reef.

Isu pertahanan keamanan yang juga menjadi penekanan Australia adalah pengamanan atas gas lepas pantai dan eksplorasi minyak di North-West Shelf yang

¹¹ Press Release: *Strengthening Offshore Maritime Security*, Prime Minister Howard's Announcement, Perth, 15 Desember 2004.

¹² Moira Coombs, *Excision from the Migration Zone Policy and Practice*, Research Note No. 42 2003-04, 1 Maret 2004 dalam <http://www.aph.gov.au/library/pubs/rn/2003-04/04rn42.htm>.

terletak di pantai Australia Barat dan laut Timor, yang pada tahun 2003 terjadi penyerangan atas pelabuhan kilang minyak Australia oleh sekelompok teroris. Ini kembali menunjukkan kekhawatiran Australia atas terganggunya aset-aset vital negaranya oleh serangan teroris.

Untuk mengatasi persoalan pengamanan di kawasan lepas pantai, Australia juga melibatkan perusahaan terkait dengan melakukan amandemen terhadap the *Maritime Transport Security Act 2003* (MTSA), dengan menugaskan pengkoordinasiannya kepada Departemen Transport dan Pelayanan regional, yang direncanakan tugas itu akan selesai dan dapat dilaksanakan terhitung mulai 30 September 2005¹³.

Selain itu, isu terorisme pasca Tragedi 11 September 2001 dan Bom Bali I pada Oktober 2002 semakin menjadi perhatian lebih bagi Australia. Ditambah dengan peledakan bom yang dibawa oleh sebuah mobil yang berhenti di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada September 2004, kembali membuat Australia lebih waspada terhadap keamanan negaranya termasuk keamanan warga negaranya di negara lain.

Respons atas Kebijakan Pertahanan Australia

Dalam menganalisis respons negara-negara tetangga dan juga negara-negara yang memiliki relevansi dengan Australia dan perpolitikan internasional, kami menetapkan Cina, Filipina, Jepang, Malaysia, Indonesia, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand.

Terkait dengan perubahan lingkungan strategis dan perkembangan isu terorisme yang merebak di dunia internasional, di mana negara-negara berlomba-lomba secara multilateral melakukan latihan militer bersama dalam forum PSI guna memerangi

penyebaran senjata pemusnah massal, Cina justru memilih untuk tidak bergabung dalam aliansi pimpinan Amerika Serikat tersebut. Alasannya, selain tidak sesuai dengan arah kebijakan luar negeri Cina, PSI juga dianggap melanggar hukum internasional dengan adanya aksi "*interdiction*" yang dilakukan oleh negara anggota, yang berarti juga melanggar supremasi suatu negara. Diperkuat dengan kedudukan Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Cina merasa memiliki tanggung jawab khusus untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Cina hanya mengharapkan adanya kerja sama yang erat dengan negara anggota inti PSI dan memainkan peran konstruktif dalam mengatasi masalah tersebut¹⁴. Namun ternyata di pihak lain, Cina bersama Rusia justru melakukan latihan militer bersama pada Agustus 2005 dalam "*Peace Mission 2005*" yang didasarkan pada nota kesepahaman yang ditandatangani Juli 2004. Lalu terkait dengan hubungan Australia dan Cina, memang lebih signifikan dalam bidang perdagangan ketimbang pertahanan. Dan persoalan kebijakan pertahanan Australia tidak akan menjadi masalah bagi Cina selama Australia mendukung "*one china policy*".

Sementara itu hubungan Australia dan Jepang kaitannya dengan keterlibatan kedua negara dalam PSI dinilai cukup signifikan. Dengan menjadi bagian dari latihan bersama PSI, Jepang mendapat keuntungan berupa pengembangan kemampuan Pasukan Bela Dirinya dalam mencegah penyebaran senjata pemusnah massal sekaligus mengamankan kepentingan jalur laut yang dilalui kapal-kapal tanker Jepang yang membawa minyak mentah dari Timur Tengah. Pengangkutan minyak mentah tersebut melalui Terusan Suez, Lautan Hindia, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Terusan Taiwan. Sedangkan kebijakan SM-3 yang menurut pernyataan Australia baru

¹³ Interview with the Australian Associated Press, November 17, 2004, hlm. 19

¹⁴ *East Asia Strategic Review 2005*, hlm. 28.

akan dikembangkan pada tahun 2013¹⁵, justru sudah lebih dahulu dikembangkan Jepang, sehingga jika Australia nanti benar-benar akan mengembangkan SM-3 akan sangat membantu Jepang dan Amerika Serikat dalam mengatasi persoalan di antaranya krisis nuklir di Semenanjung Korea.

Reaksi yang cukup unik ditunjukkan oleh Selandia Baru dalam menanggapi kebijakan pertahanan Australia terkait dengan AMIS dan SM-3. Sebagai negara di selatan Australia, tentu saja radar pengamanan sejauh 1850 km akan mencapai wilayah Selandia baru. Pada awalnya Menteri Luar Negeri Selandia Baru Phil Goff bereaksi cukup keras terhadap kebijakan tersebut karena melanggar kedaulatan. Namun beberapa waktu kemudian, pihak Selandia Baru mengaku telah meminta klarifikasi terhadap Australia dan menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan komunikasi antara Selandia Baru dan Australia atas kebijakan maritim Australia tersebut. Sejak itu ketegangan kedua negara seolah mereda dan memang perlu disadari bahwa membangun hubungan bilateral yang kondusif antara mereka lebih penting ketimbang mengedepankan konflik, baik bersenjata maupun diplomatik.

Sebagai kawasan yang terletak di utara Australia dan kerap dianggap sebagai ancaman bagi Australia, negara-negara di Asia Tenggara, dalam hal ini Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand termasuk Indonesia, memberikan reaksi yang cukup beragam terhadap kebijakan AMIS. Reaksi yang cukup keras muncul dari Malaysia dan Indonesia, karena dianggap melanggar kedaulatan. Sementara Filipina, Thailand, dan Singapura tidak memberikan pernyataan atau reaksi yang terbuka terkait dengan sikap mereka atas kebijakan Australia tersebut.

Khususnya Indonesia, berdasarkan diskusi terfokus yang dilakukan oleh tim peneliti dan juga pemberitaan di berbagai

media massa, menunjukkan bahwa terdapat reaksi yang berbeda antarinstansi atau departemen di jajaran pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan AMIZ dan SM-3. Pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono yang terkesan keras, sebenarnya cukup kondisional. Sementara di bawah permukaan, reaksi elite Indonesia jauh lebih keras. Bahkan dalam berbagai pertemuan tertutup, kalangan militer menggunakan istilah-istilah yang tidak kalah kerasnya. Reaksi berlebihan Indonesia terhadap AMIZ selain merupakan bentuk penolakan terhadap supremasi Barat, juga menjadi salah satu cara Indonesia menunjukkan nasionalismenya dalam rangka mengukuhkan identitas nasional. Namun secara umum, dilihat dari awal sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Australia hingga kini, memang kerap mengalami pasang surut. Keterlibatan tentara Australia dalam lepasnya Timor Timur dari Indonesia, menjadi isu santer yang sempat membekukan hubungan kedua negara. Selain itu perbedaan model kepemimpinan antara PM John Howard dengan para pendahulunya, dalam menyikapi hubungannya dengan Indonesia, juga menjadi salah satu penyebab yang memperkeruh hubungan bilateral kedua negara. Kasus pemberian visa terhadap 42 orang warga Papua pada awal tahun 2006 ini juga kembali menguji kekokohan hubungan kedua negara.

Penutup

Perkembangan kebijakan pertahanan Australia sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis khususnya di kawasan Asia Pasifik. Pertahanan dan keamanan kontinental menjadi dasar kebijakan pertahanan Australia dibandingkan pertahanan maritim. Padahal wilayah Australia yang dikelilingi oleh lautan, seharusnya menjadikan penting bagi Australia untuk memperkuat armada maritimnya. Namun perubahan lingkungan strategis, khususnya pasca-perang dingin,

¹⁵ Australian Defense Section-Jakarta, Responses to Issues from LIPI Seminar, 16 Mei 2005.

membuat Australia mulai mengalihkan fokus perhatian pertahanan keamanannya pada pertahanan maritim.

Pergeseran fokus perhatian tersebut telah dimulai sejak Buku Putih Pertahanan tahun 1987 berdasarkan masukan dari Paul Dibb yang termuat dalam *Dibb Report*, hingga *Defence Update* tahun 2003 pasca-tragedi 11 September 2001 yang menimpa Amerika Serikat. Di dalam periodisasi kebijakan tersebut, tidak terlalu terlihat pergeseran kebijakan yang signifikan, tapi tetap ada penekanan-penekanan pada hal-hal tertentu. Isu-isu strategis yang juga turut mempengaruhi kebijakan pertahanan Australia terkait erat dengan persoalan migrasi ilegal yang kerap membanjiri Australia, juga pengamanan terhadap aset vital Australia di gas lepas pantai dan kilang minyak dari serangan teroris. Kesemua isu strategis tersebut sesungguhnya bermuara pada ketakutan Australia terhadap serangan terorisme yang terus membayangi Australia.

Upaya konkret dalam rangka memperkuat armada maritimnya dari serangan teroris, pada akhir tahun 2004 Australia mengeluarkan kebijakan *Australia's Maritime Identification Zone* yang bertujuan untuk memeriksa kapal-kapal yang akan menuju Australia dalam identitas kapal, awak kapal, kargo, lokasi dan pelabuhan tujuan di Australia. Kebijakan yang menerapkan cakupan sejauh 1850 km ini kontan mengundang reaksi keras dan berbagai respons dari negara-negara sekitarnya, khususnya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Australia, di antaranya Indonesia, Malaysia, dan Selandia Baru. Adapun rencana pengembangan SM-3 yang diakui Australia baru akan dikembangkan tahun 2013, tidak mendapat respons secara langsung yang signifikan. Kekhawatiran muncul dari Cina dan negara-negara Asia Tenggara terhadap kemungkinan munculnya perlombaan senjata antarnegara yang memiliki nuklir, yang tentu saja akan mengancam perdamaian dunia. Sementara

Jepang justru telah lebih dahulu mengembangkan SM-3 ini bersama Amerika Serikat.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari jaring-jaring pertahanan Amerika Serikat sekaligus sekutu abadi Amerika Serikat di Asia Pasifik, Australia saat ini menjadi perhatian negara-negara tetangganya. Kepentingan Amerika Serikat dianggap telah bermain di kawasan tersebut melalui Australia dan negara Asia sekutu Amerika Serikat, seperti Jepang dan Korea Selatan.

Daftar Pustaka

- Australian Defense Section-Jakarta, Responses to Issues from LIPI Seminar, 16 Mei 2005.
- Bhakti, Ikrar Nusa dkk. 1997. *Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Republik Indonesia-Australia, Kaitannya dengan Stabilitas dan Keamanan Regional Asia Tenggara: Suatu Tinjauan Strategis Politis*. Kerja sama PPW-LIPI dengan Balitbang Deplu RI.
- Commonwealth of Australia. 1994. *Australia's Defence White Paper 1994: Defending Australia*. ACT: AGPS.
- , 1997. *Australia's Strategic Policy*. Canberra, ACT: Department of Defence.
- , 2001. *Defence White Paper 2000, Defence 2000: Our Future Defence Force*. Canberra, ACT: Department of Defence.
- , 2003. *Australia's National Security: A Defence Update*. Canberra, ACT: Department of Defence.
- , 2005. *Weapons of Mass Destruction: Australia's Role in Fighting Proliferation, Practical Responses to New Challenges*. Canberra, ACT: Australian Government.
- Coombs, Moira. *Excision from the Migration Zone Policy and Practice*. 1 Maret 2004. Research Note No. 42 2003-04 dalam <http://www.aph.gov.au/library/pubs/rn/2003-04/04rn42.htm>.
- East Asia Strategic Review 2005*.
- Interview with the Australian Associated Press, November 17, 2004, hlm. 19.

Prime Minister Howard's Announcement. 15
Desember 2004. Press Release:
"Strenghtening Offshore Maritime Security".

Review of Australia's Defence Capabilities. 1986.
Report to the Minister for Defence by Mr.
Paul Dibb. Canberra: Australian
Government Publishing Service.

Tewes, Alex. 2005. *Australia's Maritime Strategy
in the 21st Century*. Research Brief No.4
2004-05 Foreign Affairs Defence and Trade
Sections. Canberra: Parliament of Australia,
Parliamentary Library, dalam [http://
www.aph.gov.au/library/pubs/RB/2004-05/
05rb04.htm](http://www.aph.gov.au/library/pubs/RB/2004-05/05rb04.htm).